

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Penjelasan Singkat tentang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin**

Satuan Kerja Daerah baru yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin menggantikan Badan Keluarga Berencana, Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dibentuklah Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Mengenai pembagian tanggung jawab administratif, kegiatan wajib Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin terdiri dari urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Sejarah Singkat Instansi,” diakses 26 Desember 2023, <https://dppkbpm.banjarmasinkota.go.id/2020/11/sejarah-singkat-instansi.html>.



## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sejak 6 Oktober hingga 6 November 2023 secara langsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada para Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data.

Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut

### 1. Informan Pertama

Nama Lengkap : Yanuar Diansyah, S.KM., M.Kes.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data  
Usia : 49 Tahun  
Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apa bentuk kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) dalam menghambat laju pertumbuhan penduduk?” Lalu, informan menjawab,

“Dalam hal kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kota Banjarmasin, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) sesuai dengan Program dari Pemerintah Pusat melalui BKKBN yakni Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) memiliki 2 urusan Pemerintahan yakni Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Sehubungan dengan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, maka

hal tersebut berkaitan dengan Urusan Keluarga Berencana, dimana terdapat 3 (tiga) Bidang di dalamnya, yakni :

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data
- 2) Bidang Keluarga Berencana
- 3) Bidang Keluarga Sejahtera

Ada tiga faktor demografi yang memengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), yaitu fertilitas (kelahiran); mortalitas (kematian), dan migrasi. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui DPPKBPM hanya berkaitan pada faktor demografi Fertilitas (Kelahiran), dan terdapat beberapa Program yang berdampak secara langsung dan secara tidak langsung dalam hal Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, antara lain.

Pertama, Secara Langsung. Program Keluarga Berencana melalui Pelayanan Kontrasepsi MKJP dan Non-MKJP Penyuluhan KB, dan Pembinaan Kader KB.

Kedua, Secara Tidak Langsung. Program Pengendalian Penduduk melalui kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat SMP se-Kota Banjarmasin. Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (Poktan) Tribina yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana bentuk pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin melalui kebijakan program keluarga berencana?” Lalu, informan menjawab,

“Salah satu bentuk Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk oleh DPPKBPM Kota Banjarmasin melalui Program Keluarga Berencana, antara lain:

- 1) Pelayanan Kontrasepsi Bergerak menggunakan Bus Pelayanan KB yang didukung oleh Penyuluh KB dan PPKBD/Sub-PPKBD dalam hal mencari Calon Akseptor KB.
- 2) Pelayanan Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah maupun Swasta, dimana alokasi nya bersumber dari DPPKBPM yang di-dropping dari BKKBN Provinsi.

- 3) Penyuluhan KB yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB di Balai Penyuluhan KB, yang bekerjasama dengan Puskesmas atau Bidan setempat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait Pelayanan Kontrasepsi, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan Event-Event Pelayanan KB yang bekerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta, demi meningkatkan cakupan serta jangkauan di masyarakat, antara lain Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA), World Contraception Day (WCD), Pelayanan KB Malam Hari, Pelayanan KB di Destinasi Wisata (Yan- Dwita), dil.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah program keluarga berencana merupakan suatu kewajiban atau hanya opsional bagi setiap pasangan?” Lalu, informan menjawab,

“Memperhatikan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 dan pasal 12 ayat (2), mencantumkan bahwa Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang “Siapa saja target pelaksanaan pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana?” Lalu, informan menjawab,

“Target Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana yakni Pasangan Usia Subur (PUS) yang merupakan Pasangan Suami Istri yang Istrinya berumur antara 15-49 Tahun.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana?” Lalu, informan menjawab,

“Proses Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk pada faktor demografi Fertilitas (Kelahiran), melalui Program Keluarga Berencana yakni dimulai dengan membangun jalur komunikasi dan jalur koordinasi antara SKPD di lingkup Pemerintah Daerah dan dengan Pemerintah Pusat yakni BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Jalur Koordinasi antara SKPD di lingkup Pemerintah Daerah yakni dengan Dinas Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, dan Kelurahan. Seyogyanya, OPD KB tidak dapat secara maksimal melaksanakan Program Keluarga Berencana tanpa adanya dukungan dari SKPD Lintas Sektoral dan Pemerintah Pusat melalui Perwakilan di Provinsi. Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan dari Program Keluarga Berencana sebagai contoh Pelayanan KB Bergerak, harusnya bekerjasama dengan Puskesmas setempat (dimana Puskesmas merupakan bagian dari Dinas Kesehatan Kota) dalam hal Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi pada Calon Akseptor. Lalu terkait Pencatatan dan Pelaporannya, berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi, dikarenakan Aplikasi yang digunakan harusnya Aplikasi terbitan dari Pemerintah Pusat.”

Keenam, peneliti menanyakan tentang “Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin?” Lalu, informan menjawab,

“Faktor Pendukung Utama yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk yakni dari demografi itu sendiri antara lain Fertilitas (Kelahiran), Mortalitas (Kematian), dan Migrasi. Sehubungan dengan Program Keluarga Berencana dan DPPKBPM Kota Banjarmasin hanya berperan pada faktor Fertilitas (Kelahiran) dengan beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan antara lain Pelayanan KB, Penyuluhan KB, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dll. Serta didukung dari segi ketenagaan yakni adanya Penyuluh KB di setiap kecamatan, dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) yang berada di setiap kelurahan, yang sangat membantu dalam keberhasilan Program Bangsa Kencana hingga ke seluruh lapisan masyarakat”

Ketujuh, peneliti menanyakan tentang “Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin?” Lalu, informan menjawab,

“Selanjutnya terkait faktor yang menghambat keberhasilan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banjarmasin, antara lain: Pandemi Covid-19 (Tahun 2020-2021), Mitos di Masyarakat dan Aturan Keagamaan, Kurangnya peran dan suami, Ketidaktahuan manfaat dari kepesertaan KB, dan Kekhawatiran akan efek samping dari alat dan obat kontrasepsi.”

## 2. Informan Kedua

Nama Lengkap : dr. Bandiyah Ma’rifah, M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana  
Usia : 44 Tahun  
Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah program keluarga berencana merupakan suatu kewajiban atau hanya opsional bagi setiap pasangan?” Lalu, informan menjawab,

“Saat ini program KB masih bersifat opsional, terlebih yang berkaitan dengan alat kontrasepsi. Karena apa? Mindset di masyarakat masih mengira bahwa program KB merupakan bagian alat kontrasepsi. Padahal, yang dimaksud dengan program KB adalah bagaimana satu keluarga tersebut sudah memiliki rencana bagaimana keluarga tersebut dibentuk. Ada beberapa hal, pertama, mengatur jarak kelahiran. Kedua, membuat satu program dengan tujuan menjamin anak mereka bisa

mendapatkan pendidikan. Ketiga, bagaimana mereka melakukan perencanaan terkait jumlah anak yang diinginkan. Jadi, program KB saat ini, tidak lagi identik dengan ‘2 anak lebih baik’, tetapi bagaimana mengatur jarak kelahiran.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Siapa saja target pelaksanaan pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana?” Lalu, informan menjawab,

“Target kami adalah pasangan yang masih di usia subur dengan melihat dari sisi wanita yang sudah mengalami haid. Namun, hal itu tidak lagi karena target sekarang ialah remaja dan jua pria, tidak hanya wanita.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana?” Lalu, informan menjawab,

“Proses tersebut jika dilihat dari data pelayanan program KB Kota Banjarmasin Tahun 2022, ternyata masih perlu banyak bantuan dari stakeholder. Balik lagi juga ke masalah mindset masyarakat yang masih mengira bahwa program KB hanya tentang alat kontrasepsi. Padahal, program KB merupakan cara mengatur bagaimana jarak kelahiran anak mereka agar mereka bisa lebih optimal dalam pembinaan dan kesejahteraan anggota keluarganya, terutama anak. Jika kita melihat Al-Qur’an, jarak kelahiran anak sudah diatur, yaitu 2 tahun yang merupakan masa menyusui. Hikmahnya adalah adanya proses penyembuhan rahim pasca melahirkan. Selanjutnya, memaksimalkan gizi anak dengan teraturnya pemberian ASI. Hikmah tersebutlah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman terhadap program KB.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang “Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin? ” Lalu, informan menjawab,

“Faktor pendukung tersebut adalah

- 1) Sudah terbukanya akses informasi yang bisa didapatkan masyarakat melalui media elektronik dan media sosial.
- 2) Peran masyarakat sudah mulai terbuka dengan program pemerintah, salah satunya ialah program KB.
- 3) Sudah banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah membuka pelayanan program KB seperti alat kontrasepsi pilihan sebagai bentuk opsional”

Kelima, peneliti menanyakan tentang “Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin? ” Lalu, informan menjawab,

“Faktor penghambat tersebut ialah

- 1) Masyarakat masih belum terarah secara keseluruhan terkait informasi tentang program KB.
- 2) Masih ada pemikiran dari segelintir orang yang masih memiliki pemikiran konservatif dengan menyebut bahwa ‘banyak anak, banyak rezeki’.
- 3) Masyarakat masih perlu dipahamkan tentang alat kontrasepsi.”

### 3. Informan Ketiga

Nama Lengkap : Nurbaiti, S.Pi.

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera

Usia : 55 Tahun

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Siapa saja target pelaksanaan pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana?” Lalu, informan menjawab,

“Target dilakukan 3 bulan sebelum pernikahan karena yang kita harapkan, calon pasangan melapor kepada kami melalui aplikasi. Namun, dalam kenyataannya, regulasi di sini tidak terlaksana. Kita mengharapkan seperti itu, tetapi apakah kelurahan dan KUA mendukung itu? Sepertinya belum mendukung. Sayangnya, di Kota Banjarmasin belum dapat terlaksana karena kita tidak ingin memaksakan bahwa harus melakukan karena kita harus melihat hak orang tersebut juga, kapan mereka menentukan pernikahan, kehamilan, dan lain-lain. Sebab di tempat lain, hal seperti itu merupakan saran dan harus melakukan konsultasi sebelum menikah kepada petugas dan akan diberikan sertifikat kepada calon pasangan.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah bentuk pengendalian pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin sudah berjalan secara efektif?” Lalu, informan menjawab,

“Upaya yang dilaksanakan bagaimana penduduk Kota Banjarmasin dengan wadah luas seperti ini. Dengan banyaknya penduduk, jangan sampai rata-rata penduduk punya anak dengan skor 2,1 lebih, meskipun di Kota Banjarmasin sudah menyentuh angka 2,2. Namun, hal ini tidak merata karena dalam keluarga, ada yang tidak punya anak, punya 1 anak, punya 2 anak, bahkan lebih, tetap saja, rata-rata, setiap keluarga punya anak rata-rata 2,2. Adapun upaya yang dilakukan dari pelayanan KB ialah jangan sampai ada keluarga memiliki banyak anak karena itu akan mempengaruhi jumlah penduduk. Padahal kita sedang melakukan pengendalian penduduk. Dapat dibayangkan, dengan bertambahnya 0,1 anak di Kota Banjarmasin, meskipun masih bertambah sedikit, tetapi itu tetap akan berpengaruh dengan penggunaan listrik, minyak, dan kebutuhan keluarga lainnya. Oleh karena itu, kami di bidang ini, telah melakukan banyak upaya agar jangan sampai keluarga memiliki banyak anak, terlalu muda menikah, terlalu tua melahirkan, atau terlalu sering

melahirkan karena akan ada dampaknya, seperti dampak keluarga dan dampak kesehatan.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin?”

Lalu, informan menjawab,

“Adapun faktor pendukungnya ialah kita memiliki mitra kerja seperti SKPD, psikolog, kader sampai tingkat RT. Sedangkan faktor penghambatnya ialah pertama, mengharapkan koordinasi berupa kerja sama, tetapi tidak semua yang kita lakukan langsung lancar; kedua, SDM yang ada sangat terbatas; dan ketiga, perangkat yang tersedia juga sangat terbatas.”

### **C. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan peneliti merupakan topik pembahasan utama yaitu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti dan data yang diperoleh dari informan

#### **1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin**

Peran pemerintah Kota Banjarmasin melalui DPPKBPM setidaknya bisa dirincikan sebagai berikut. Pertama, melakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kedua, melakukan proses pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kedua peran ini kembali dirincikan lagi sesuai dengan pembagiannya. Sebagaimana yang telah peneliti lakukan dengan mencoba mewawancarai semua kepada bidang di DPPKBPM.

Pertama, bentuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB dibagi menjadi empat, sebagaimana menurut Bapak Yanuar Diansyah, yaitu pertama, pelayanan Kontrasepsi Bergerak menggunakan Bus Pelayanan KB yang didukung oleh Penyuluh KB dan PPKBD/Sub-PPKBD dalam hal mencari Calon Akseptor KB. Kedua, pelayanan Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah maupun Swasta, yang mana alokasinya bersumber dari DPPKBPM yang di-dropping dari BKKBN Provinsi. Ketiga, Penyuluhan KB yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB di Balai Penyuluhan KB, yang bekerjasama dengan Puskesmas atau Bidan setempat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait Pelayanan Kontrasepsi, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, Pelaksanaan Event-Event Pelayanan KB yang bekerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta, demi meningkatkan cakupan serta jangkauan di masyarakat, antara lain Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA), World Contraception Day (WCD), Pelayanan KB Malam Hari, Pelayanan KB di Destinasi Wisata (Yan- Dwita), dan lain-lain.

Dalam hal ini, bentuk pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk difokuskan pada kontrasepsi, sebagaimana pada poin pertama dan ketiga di atas. Metode kontrasepsi pun terdiri dari mekanik dan kimiawi yang juga dapat dilakukan secara alami tanpa alat bantu maupun dengan alat bantu. Dengan hal ini, pihak DPPKBPM memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga sekaligus sebagai konselor bagi masyarakat sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengikuti program KB.

Selanjutnya, mengenai wajib atau opsionalnya program KB, dua informan memiliki sedikit jawaban berbeda. Pertama, informan Bapak Yanuar Diansyah menjawab dari sisi DPPKBPM itu sendiri yang mana menurutnya, DPPKBPM wajib menjalankan program KB karena mengacu pada Pasal 11 dan 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena berkaitan dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun, dalam urusan wajib atau opsionalnya yang dilakukan masyarakat, informan Ibu Bandiyah Ma'rifah memberi jawaban sehingga melengkapi jawaban Bapak Yanuar Diansyah. Menurut Ibu Bandiyah Ma'rifah, program KB masih bersifat opsional, terutama berkaitan dengan alat kontrasepsi. Hal ini disebabkan adanya kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB. Selain itu, ada kesalahpahaman di masyarakat yang menyebutkan bahwa program program KB. Padahal, tujuan utama adanya program KB ialah mengatur jarak kelahiran; membuat satu program dengan tujuan menjamin anak mereka bisa mendapatkan pendidikan; dan melakukan perencanaan terkait jumlah anak yang diinginkan. Jadi, fokus utama program KB

tidak lagi mengatur tentang pembatasan jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran. Jadi, poin-poin di atas masih bersifat opsional karena masih adanya kesalahpahaman di masyarakat. Hal ini mengartikan, tidak menutup kemungkinan, program KB akan menjadi wajib dilakukan bagi setiap pasangan, bahkan sebelum mereka menikah.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan target pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Ketiga informan juga memiliki jawaban yang bervariasi, tetapi memiliki persamaan, yaitu pasangan di usia subur. Menurut Bapak Yanuar Diansyah, pasangan usia subur yang dimaksud sejak usia 15 tahun hingga 49 tahun. Namun, Ibu Bandiyah Ma'rifah, usia subur dari sisi wanita tidak mengenai usia karena yang dijadikan tolok ukur ialah bagi wanita yang sudah mengalami haid. Tidak ketinggalan, target lainnya tidak hanya wanita, tetapi juga pria, dan juga usia yang telah digolongkan sebagai remaja. Terakhir, Ibu Nurbaiti berpendapat bahwa target yang paling utama ialah para calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini karena adanya regulasi yang berhubungan dengan ini. Adapun target tersebut ditujukan kepada calon pasangan yang ingin menikah 3 bulan sebelumnya yang artinya, sebelum melangsungkan pernikahan, 3 bulan sebelumnya harus dilakukan pengarahan yang diinisiasi oleh DPPKBPM. Adapun yang diinginkan dari adanya tujuan ini ialah untuk menentukan pernikahan, kehamilan, dan lain-lain. Namun, hal ini tidak jarang terjadi di kota Banjarmasin dengan alasan bahwa pihak pendukung seperti kelurahan dan KUA belum sepenuhnya ikut terlibat. Akibatnya, peserta berhak menentukan pilihannya apakah

tetap mengikuti program ini atau tidak karena tindak lanjut tidak begitu masif dilakukan. Padahal, tujuan dari program konsultasi ini ialah untuk memastikan kesiapan calon pasangan, sehingga bagi mereka yang sudah dinyatakan siap akan mendapatkan sertifikat dari petugas.

Perihal lainnya berkaitan dengan proses pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Bapak Yanuar Diansyah melihat faktor ini dari segi demografi kelahiran yang nantinya melalui jalur birokrasi dari para pemangku kebijakan akan saling berkoordinasi satu sama lain, mulai dari pemerintah daerah mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, dan Kelurahan hingga pemerintah pusat yang diwakili oleh BKKBN Provinsi. Menurut Bapak Yanuar Diansyah, kunci kesuksesan proses pelaksanaan ini ada di tangan para pemangku kebijakan atau pemerintah. Hasil koordinasi antarlembaga pemerintah akan saling mempermudah proses pelaksanaan. Hal senada juga dijawab oleh Ibu Bandiyah Ma'rifat yang mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk tidak lepas dari adanya peran pemangku kebijakan atau pemerintah itu sendiri. Hal ini kembali lagi kepada masyarakat yang belum optimal dalam keikutsertaan program KB. Hal-hal bersifat teknis berupa pembinaan program KB serta pola pikir tentang program KB juga menjadi masalah.

Artinya, kembali lagi pada pemaknaan peran itu sendiri yang dinyatakan oleh Van Sell et al<sup>2</sup> seseorang bisa menghadapi konflik peran ketika ada lebih dari satu tuntutan atau ekspektasi yang diberikan kepada mereka pada waktu yang bersamaan. Konflik ini muncul karena memenuhi salah satu tuntutan bisa membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan lainnya. Sehingga, hal yang masih kurang pemerintah lakukan, harus lebih ditingkatkan lagi dalam peranannya.

berkenaan dengan efektivitas bentuk pengendalian penghambat laju pertumbuhan penduduk. Menurut informan Ibu Nurbaiti, dalam masalah ini harus melihat data dan fakta di lapangan. Indeks rata-rata penduduk di Indonesia memiliki anak dengan skor 2,1. Namun, pada kenyataannya, di kota Banjarmasin, rata-rata penduduk memiliki anak dengan skor 2,2. Meskipun hanya bertambah 0,1, tetap saja hal ini akan berpengaruh pada lini kehidupan lainnya. Sebagai contoh, dengan adanya bertambahnya 0,1 itu jika dijumlahkan dengan jumlah pasangan yang ada di kota Banjarmasin, tentu akan menghasilkan ribuan anak, yang seharusnya jumlah penduduk kota Banjarmasin tidak mencapai demikian. Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan dalam program KB harus lebih dimasifkan lagi sehingga program KB benar-benar efektif dalam menekan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin. Bentuk tindakan preventif yang diharapkan ialah jangan sampai keluarga memiliki banyak anak, terlalu muda menikah, terlalu tua

---

<sup>2</sup> Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional (Studi Pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)," hlm. 320.

melahirkan, atau terlalu sering melahirkan karena akan ada dampaknya, seperti dampak keluarga dan dampak kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) tidak lepas dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang tersebut telah menetapkan kebijakan tersebut untuk menjamin perkembangan dan pembangunan keluarga yang bertujuan, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Selain itu, untuk tingkat daerah, melalui Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, DPPKBPM selaku instansi yang berkaitan dengan seputar keluarga berencana, melakukan kebijakan serta kendala yang dihadapi.

Melalui wawancara kepada informan pertama, Bapak Yanuar Diansyah terkait kebijakan yang telah dilakukan DPPKBPM, yaitu adanya Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang memiliki 2 urusan Pemerintahan yakni Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Sehubungan dengan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Adapun yang berkaitan dengan Urusan Keluarga Berencana terdapat 3 bidang, yaitu Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera. Secara umum, ada 3 faktor demografi yang memengaruhi Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP), yaitu fertilitas (kelahiran); mortalitas (kematian), dan migrasi. Namun, tugas DPPKBPM hanya berkaitan pada faktor demografi Fertilitas (Kelahiran), dan terdapat beberapa program yang berdampak secara langsung dan secara tidak langsung dalam hal Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, di antaranya ialah secara langsung program KB dilakukan melalui Pelayanan Kontrasepsi MKJP dan Non-MKJP Penyuluhan KB, dan Pembinaan Kader KB. Selanjutnya dilakukan secara tidak langsung dengan melalui Program Pengendalian Penduduk melalui kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat SMP se-Kota Banjarmasin, Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (Poktan) Tribina yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).

Artinya, sebagaimana pemaparan informan di atas, DPPKBPM telah melakukan kebijakan yang sesuai dan menjalankan sesuai tugas DPPKBPM selaku dinas yang menaungi program KB. Maka, apa yang telah dilakukan DPPKBPM merupakan peran yang mereka lakukan selaku tangan pemerintah Kota Banjarmasin dalam bidang program KB. Hal ini tidak lepas hak mereka untuk diikuti masyarakat dengan apa yang telah mereka lakukan melalui kebijakan-kebijakan yang menghasilkan program yang menunjang kehidupan berkeluarga masyarakat. Begitu juga kewajiban yang telah mereka lakukan, membantu masyarakat. Sehingga peran mereka ada karena adanya kedudukan mereka selaku yang menjalankan program KB.

Adapun hal yang berkaitan dengan faktor pendukung yang mempengaruhi penghambat laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana DPPKBPM. Ada 3 informan yang memberikan jawaban, yaitu Bapak Yanuar Diansyah, Ibu Bandiyah Ma'rifah, dan Ibu Nurbaiti. Ketiganya memberikan jawaban yang bervariasi.

Pertama, menurut Bapak Yanuar Diansyah, faktor pendukung yang dimaksud ialah dari segi demografi itu sendiri, yaitu faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun, di sini, sesuai tugas DPPKBPM hanya melalui peran pada faktor kelahiran karena berhubungan dengan program KB, seperti Pelayanan KB, Penyuluhan KB, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan lain-lain. Selain itu, faktor SDM segi ketenagaan, yakni adanya Penyuluh KB di setiap kecamatan, dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) yang berada di setiap kelurahan, yang sangat membantu dalam keberhasilan Program Bangga Kencana hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Artinya, faktor pendukung ada pada masyarakat itu sendiri yang sudah lebih memperhatikan faktor kelahiran anaknya dengan mengikuti program DPPKBPM.

. Kedua, Ibu Bandiyah Ma'rifah memberikan jawaban bahwa faktor pendukung yang dimaksud ialah adanya akses informasi yang DPPKBPM lakukan melalui media elektronik seperti website resmi DPPKBPM serta media sosial seperti Instagram. Selain itu, peran masyarakat itu sendiri yang secara langsung sadar akan pentingnya program KB yang telah DPPKBPM lakukan, serta fasilitas

kesehatan sudah memadai dan pelayanan program KB sudah ada, seperti halnya memilih alat kontrasepsi sebagai pilihan opsional, bukan pilihan utama.

Ketiga, jawaban informan Ibu Nurbaiti hanya memberikan poin penting, yaitu faktor pendukung ada karena adanya mitra kerja seperti SKPD, psikolog, kader sampai tingkat RT. Jika melihat ketiga jawaban informan, maka ada dua faktor, yaitu utama dan pelengkap. Pertama, faktor utama yang dimaksud berupa demografi itu sendiri berupa masyarakat melalui DPPKBPM dari segi faktor kelahiran karena berhubungan dengan program KB, seperti Pelayanan KB, Penyuluhan KB, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan lain. Faktor utama ini dilakukan secara langsung yang berhadapan dengan masyarakat. Kedua, faktor pelengkap yang dimaksud ialah informasi-informasi masif yang dilakukan DPPKBPM melalui media elektronik dan media sosial, walaupun yang melakukannya ialah DPPKBPM, tetapi hal ini tidak dilakukan langsung kepada masyarakat, sehingga dianggap pasif dalam faktor pendukung program KB. Begitu juga faktor pendukung lainnya, yaitu mitra kerja seperti SKPD, psikolog, kader sampai tingkat RT yang dianggap sebagai pihak kedua karena tidak langsung dari DPPKBPM, meskipun masih dianggap aktif karena dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

Kebijakan yang DPPKBPM lakukan merupakan cara *preventive checks*. Hal ini sejalan dengan Malthus<sup>3</sup> yang berpendapat bahwa angka kelahiran dapat

---

<sup>3</sup> Alma, *Ilmu Kependudukan*, (Malang: Wineka, 2019), hlm. 4.

ditekan, salah satunya menggunakan alat kontrasepsi, meskipun sebenarnya ia belum menerima alat kontrasepsi. Namun, *preventive checks* dinilai tepat dan sesuai dengan tugas DPPKBPM, yaitu pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran daripada *positives checks* berupa pengurangan penduduk melalui proses kematian. Jelasnya, ini tidak sesuai manusiawi dan bertentangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) karena harus dilakukan dengan cara pembunuhan, bahkan genosida. Sehingga, kebijakan yang DPPKBPM lakukan sudah tepat.

## **2. Kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Terkait Pelaksanaan Program Keluarga Berencana untuk Mengatur Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banjarmasin**

Meskipun sudah terlihat faktor pendukung penghambat laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin, tetapi masih ada faktor pengambat keberhasilan. Sebagaimana hasil penelitian, ketiga informan juga memiliki jawaban yang variatif. Pertama, informan Bapak Yanuar Diansyah mengatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun, adanya mitos budaya dan aturan agama, kurangnya peran istri dan suami, ketidaktahuan manfaat dari kepesertaan KB, dan kekhawatiran akan efek samping dari alat dan obat kontrasepsi. Kedua, informan Ibu Bandiyah Ma'rifah hampir memiliki jawaban yang sama dengan informan sebelumnya, yaitu secara umum, masyarakat masih ada yang belum paham dengan program KB, terutama tentang alat kontrasepsi. Lalu, adanya

pemikiran konservatif yang masih menginginkan memiliki anak banyak karena diyakini dapat mendatangkan rezeki. Ketiga, jawaban berbeda disampaikan oleh Ibu Nurbaiti yang menyebutkan bahwa faktor penghambat terjadi ketika tidak lancarnya program yang dilaksanakan ketika berkoordinasi dengan pihak lain. Selain itu, SDM yang ada pun juga kurang memadai atau sangat terbatas, termasuk perangkat yang ada.

Melihat faktor penghambat ini, secara umum terjadi karena faktor demografi juga. Di saat sebagian masyarakat atau penduduk sudah cukup banyak tereduksi dengan adanya program KB, di saat itu juga masih ada yang masih mengabaikan program KB. Terlebih, masih ada masyarakat yang masih memiliki pemikiran konservatif yang terjebak dengan pemahaman yang terbatas, seperti adanya memahami bahwa harus memiliki banyak anak. Seakan-akan agama membebaskan sepenuhnya tanpa kontrol yang membuat antara agama dan ilmu pengetahuan seperti program KB bertentangan. Padahal, memiliki banyak anak juga harus diimbangi dengan adanya pemahaman nas agama yang tepat serta keseimbangan ekonomi keluarga. Jika antara keinginan memiliki anak banyak tanpa memperhitungkan faktor ekonomi yang matang, maka bonus demografi di Indonesia akan terus berkembang yang membuat program KB akan terhambat.

Hal ini mengingatkan pada pendapat Alex Inkeles dan David Smith<sup>4</sup> tentang pembangunan bahwa pembangunan bukan sekadar perkara pemasok

---

<sup>4</sup> Safitri, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga Berencana (KB)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), hlm. 17.

modal dan teknologi saja, tetapi juga membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan sarana yang berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Artinya, hubungan antara demografi dan pembangunan tidak hanya berbicara tentang kuantitas penduduk, tetapi yang terpenting juga kualitas penduduk. Bagi siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk merencanakan kehidupan berkeluarga, maka dapat dipercaya manusia mampu mengubah alam semesta, bukan sebaliknya.